



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

SKRIPSI

**PENGARUH SEKTOR EKONOMI BASIS TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KOTA PADANG PANJANG**


Oleh

PUJA HADI PURNAMA
06151071

**Mahasiswa Program S-1
Jurusan Ilmu Ekonomi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2011**

	No. Alumni Universitas	PUJA HADI PURNAMA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a) Tempat/tanggal lahir : Padang Panjang/ 21 Maret 1988 b) Nama Orang Tua : Erdy Modus & Darmunis c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151071 f) Tanggal Lulus : 2 Februari 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : i) Lama Studi : 4 tahun 5 bulan h) Alamat Orang Tua : Perum BUMI Lubuk Buaya Indah A/3, Padang, Sumatera Barat.

Pengaruh Sektor Ekonomi Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Skripsi S1 oleh: Puja Hadi Purnama Pembimbing Skripsi: Prof.Dr. Sjafrizal, SE.MA

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh sektor ekonomi basis terhadap pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang dari tahun 1997 sampai tahun 2008 . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor basis Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode LQ(Location Quont), untuk mengetahui pengaruh sektor basis tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan metode regresi linear berganda, dan untuk mengetahui tingkat signifikan dari pengaruh sektor basis tersebut dilakukan uji parsial(T- test). Berdasarkan perhitungan LQ, Kota Padang Panjang memiliki lima sektor basis (dimana $LQ > 1$) yaitu: Sektor Bangunan, Sektor Listrik Gas dan air minum, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ,Sektor Keuangan, Sektor Jasa-jasa. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,985 (98,5%) yang membuktikan bahwa sektor basis berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dari kelima sektor tersebut hanya Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan Sektor Jasa yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 2 Februari 2011
Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Prof.Dr. Sjafrizal, SE,MA	Drs. Yusrizal Yulius MA	Drs. Amra Ausri

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu saja membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan semua pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah dibenkan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan yang berkesinambungan, dalam arti kata harus ada dana yang selalu diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan (Suparmoko, 1997).

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang sekarang telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, hal ini setidaknya membawa angin segar bagi otonomi daerah yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974

tentang Pemerintahan di daerah yang merupakan produk orde baru yang sampai sekarang undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara murni.

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lengkap terhadap seluruh tantangan dan masalah. Peran pemerintah daerah sangat menentukan kebijakan pembangunan ekonominya. Kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan di dalam menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Pemerintah daerah dalam upaya memantapkan otonomi daerah dan persiapan menghadapi tantangan ke depan serta mengupayakan pengelolaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan potensi daerah dan daya dukung yang dimiliki.

Pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah pembangunan ekonomi yang dicapai dengan cara memanfaatkan potensi daerah secara optimal dengan kebijakan dan kewenangan (authority) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kesiapan daerah dalam melaksanakan

Bab VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Sektor - Sektor Basis Kota Padang Panjang

Sektor-sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis adalah sektor-sektor yang berdasarkan perhitungan Location Quotient memiliki nilai besar dari 1 ($LQ > 1$). Hasil temuan empiris daerah Kota Padang Panjang selama periode analisa diketahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis, yaitu:

1. Sektor Listrik, Gas, Air Minum

Sektor Listrik, Gas, Air Minum merupakan sektor basis Kota Padang Panjang, yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi sebesar terhadap PDRB Sumatera Barat yaitu sebesar 2,78 persen.

2. Sektor Bangunan

Pertumbuhan sektor ini di hasilkan dari berbagai pembangunan kawasan perumahan baru, lanjutan pembangunan Rumah Sakit Internasional, pembangunan Minangkabau Vilage menjadi "Minangkabau Niagara Fantasi Island, pembangunan jalan umum, lanjutan pembangunan pasar dan fasilitas lainnya yang dilakukan swadaya masyarakat ataupun dana pemerintah.

Selama tahun 2008 sektor ini member kontribusi yang cukup besar untuk PDRB Padang Panjang yaitu sebesar 8,36 persen dan sedikit menaik dari tahun 2007 yang mencapai 8,32 persen

DAFTAR PUSTAKA

- Adrimas, Drs. H. 2002. *Perencanaan Pembangunan I*. Padang : UBH.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Brian Lego, Tesfa Gebrecredhin, dan Brian Cushing, 1999, *A Multy Sector Export Base Model of Long Run Regional Economic Growth*.
- Crone, Lisa K ,Richard W Haynes dan Nicholas E Reyna, 1999, *Different Perspectives in Economic Base*.
- Easterly, William. *The Elusive Quest for Growth*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- Jhingan, M.I.. 2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Crone, Lisa K ,Richard W Haynes dan Nicholas E Reyna, 1999, *Different Perspectives in Economic Base*.
- K, Deddy. 2006. *Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru*. Jakarta. Bappenas.
- Kurniawan, Eko. 2004. Pengaruh Sektor Basis terhadap PDRB. Padang
- Kuncoro, Mudrajat. 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga; Jakarta.
- Muhammad Abdul Mukhyi, dkk, 2008, *Analysis Role Subsector Agriculture and Sector Advantage to Economic Area Development of Province West Java: Approach Analysis IRIO*
- Nazara, Suahasil dan Nurkolis. Jan 2002. *Ukuran Optimal Pemerintahan Daerah Di Indonesia Sk : Pemekaran Wilayah Kab/Kota Dalam Era Desentralisasi*. Jurnal ekonomi & manajemen Vol. VII No. 2.